

Resensi Buku

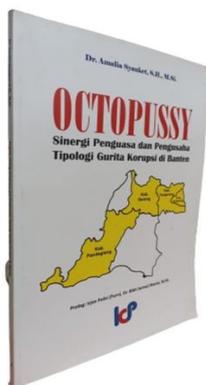
ANALISIS SINERGI PENGUSAHA DAN PENGUSAHA DALAM KASUS KORUPSI DI BANTEN

Synergy Analysis of Ruler and Entrepreneurs in Corruption Cases in Banten

Efriza

Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sutomo, Serang – Banten

efriza10099@unpam.ac.id



Judul : OCTOPUSSY: Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten
Penulis : Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si
Jumlah Hal. : xi + 62 hal.
Penerbit : Kreasi Cendekia Pustaka, Jakarta
Cetakan 1 : Mei 2021

Abstract

The article describes a book review of Amalia Syauket's work entitled Octopussy: The Synergy of Rulers and Entrepreneurs on the Typology of Corruption Octopus in Banten. Along with the growth and development of Banten as a province, it is intertwined with the reality of the Political Dynasty. Especially what happened in Banten, the Octopussy type Political Dynasty with the existence of synergy between rulers and Entrepreneurs in forming a dynasty. The prestige of the Political Dynasty, which was originally expected to end due to Ratu Atut as the Ruler of the Clan being imprisoned due to a bribery case in the regional head election dispute in Lebak, turned out to be that the authority of the Political Dynasty decreased for a moment. Ratu Atut's family returned to power in Banten after their son Andika Harzumy was elected

deputy governor of Banten. The glory of the Political Dynasty in Banten which was built by design will allegedly remain strong with the presence of two potential candidates from the Ratu Atut Family namely Andika Harzummy and Airin Rachmi Diany as candidates for governor of Banten. The glory of the Political Dynasty was intertwined with corruption and also caused increasing poverty in Banten.

Keywords: *Political Dynasty, Octopussy, Corruption, Regional Head Election.*

Abstrak

Artikel menguraikan risensi buku dari karya Amalia Syauket yang berjudul *Octopussy: Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten*. Seiring bertumbuh dan berkembangnya Banten sebagai provinsi berkelindan dengan realitas Dinasti Politik. Khusus yang terjadi di Banten, Dinasti Politik bertipe *Octopussy* dengan adanya sinergi antara penguasa dan pengusaha dalam membentuk dinasti. Wibawa Dinasti Politik yang awalnya diperkirakan akan berakhir akibat Ratu Atut sebagai Penguasa Klan dipenjara karena kasus suap sengketa Pilkada di Lebak, ternyata wibawa Dinasti Politik menurun sesaat saja. Keluarga Ratu Atut kembali berkuasa di Banten setelah Anaknya Andika Harzummy terpilih sebagai wakil gubernur Banten. Kejayaan Dinasti Politik di Banten yang dibangun *by design* disinyalir akan tetap kuat dengan adanya dua orang kandidat potensial dari Keluarga Ratu Atut yakni Andika Harzummy dan Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten. Kejayaan Dinasti Politik telah berkelindan dengan korupsi dan juga menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Banten.

Kata Kunci: *Dinasti Politik, Octopussy, Korupsi, Pilkada.*

Airin Rachmi Diany mantan Wali Kota Tangerang Selatan dua periode ini, awalnya digadang-gadang maju sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak November 2024 mendatang (tribuntimur.com, 2022). Hanya saja Airin memiliki minus dengan batu sandungan stigma dinasti politik Ratu Atut Chosiyah di Banten. Status Airin adalah sebagai adik ipar Ratu Atut mantan gubernur Banten yang dipenjara akibat kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Selain, Ratu Atut, juga turut mendekam di penjara adalah Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) adiknya Ratu Atut yang juga merupakan suami dari Airin Rachmi Diany (kabar24.bisnis.com, 2014).

Melihat kemungkinan stigma negatif terhadap Airin jika berniat maju sebagai Cagub DKI Jakarta. Di sisi lain, pengaruh dan kekuasaan kakak iparnya Ratu Atut masih begitu besar, maka tak menutup kemungkinan Airin lebih memilih untuk memperkuat pengaruh dan kekuasaan di Provinsi Banten tersebut. Dinasti Politik

dari klan Atut masih begitu kuat tampak dari fakta keterpilihan Wahidin Halim yang berpasangan dengan Andika Harzummy anak dari Ratu Atut. Pilkada 2017 lalu, membuktikan cengkraman kekuasaan keluarga Ratu Atut masih begitu kokoh menguasai Banten (Mhd. Al Fajhri Sukri, 2020).

Ternyata, kasus suap dalam sengketa Pilkada Bupati Lebak hanya meruntuhkan wibawa politik dinasti sesaat. Harus diakui, Ratu Atut Chosiyah tatkala menjadi Gubernur Banten telah menduduki posisi puncak dari dinasti politik Banten. Ratu Atut telah membangun dinasti politik melalui pemerintah bayangan (*shadow state*) yang ditransformasikan ke sistem pemerintahan di Banten, yang diarsiteki oleh *local strongman (the godfather)* Haji Chasan Sohib, sang Ayahanda (Amalia Syauket, 2021: 6).

Dinasti Politik Banten diuraikan dengan jelas dalam kajian Amalia Syauket mengenai sinergi penguasa dan pengusaha hingga terjadinya gurita korupsi di Banten. Karya Amalia ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yang menjelaskan mengenai: Bab 1 Banten *Shadow State*; Bab 2 *The Godfather*; Bab 3 Gurita Korupsi di Banten; Bab 4 Tubagus Chaeri Wardana, Pangeran Banten; Bab 5 Dampak Korupsi dari Dinasti Politik Ratu Atut; dan Bab 6 Penutup: Harapan Pembaruan Politik Banten.

Tradisi melanggengkan kekuasaan pada awalnya dari insting setiap individu yang melembaga dalam kelompok seperti dinasti, klan atau marga, seperti yang terjadi di Dinasti Politik Banten. Dinasti Politik dapat terwujud juga tak bisa dilepaskan dari karakteristik masyarakat Banten. Karakteristik masyarakat Banten ini tergambarkan sebagai masyarakat yang taat beragama, sudah sewajarnya menempatkan para guru atau Kyainya sedemikian terhormatnya. Peran Kyai bukan hanya sebagai tokoh agama namun juga pemimpin informal kemasyarakatan pada umumnya, seperti dalam organisasi kesatuan adat-pencak silat yang menjadi ciri khas adat Banten juga sebagai sesepuh Jawara Banten yang memiliki kedigdayaan secara magis, fisik yang mumpuni, dan keberanian (Amalia Syauket, 2021: 25). Hal inilah

yang menjadi lahan subur untuk timbulnya *local strongman*, fakta inilah yang menempatkan Haji Chasan Sohib menjadi *the godfather*.

Tradisi keislaman di Banten, kala itu menempatkan kyai-jawara menjadi mitra pemerintah. Awal kemunculan Jawara berpatron dengan Kyai, akan tetapi perlahan mereka tumbuh dan berkembang menjadi kelompok yang otonom secara politik terhadap kalangan kyai. Kelompok Jawara pada masa Orde Baru menikmati akses politik dan ekonomi demikian besar (Lili Romli, 2007: 6). Saat itu, Haji Chasan Sohib inilah orang kuat lokal di Banten yang telah mendirikan dinasti politik yang terpusat dan terprogram.

Chasan Sohib adalah jawara yang dengan bersama ulama setempat didapuk menjadi pemimpin informal yang berafiliasi dengan Golkar, partai kuat kala itu. Modal Sosial Politik yang begitu penting telah mendorong Chasan menjadi tokoh paling kuat mendominasi Banten. Agar kedigdayaan Chasan berkembang terus, ia menyesuaikan dengan dinamika politik berupa mengubah tipe oligarkinya yang semula bertipe Sultanik menjadi oligarki penguasa kolektif pada Era Modern (Amalia Syauket, 2021: vi, dan 6). Selanjutnya, setelah Tubagus Haji Chasan Sohib wafat tahun 2011, Wawan memegang posisi sentral yang mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di Banten. Ia juga merupakan suami dari Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Dinasti politik di Banten dilakukan oleh kelompok Jawara yang disebut sebagai *informal government* yang dilakukan oleh Haji Chasan Sohib. Kelompok Jawara ini telah memasuki Orde Reformasi dimulai tahun 1998. Orde Reformasi melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi peluang baru bagi masyarakat Banten untuk merealisasi keinginan lama yang terpendam sejak tahun 1953 yakni mewujudkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi yang mandiri lepas dari Jawa Barat (Amalia Syauket, 2021: 11).

Pada akhirnya Banten resmi menjadi provinsi pada tanggal 18 Oktober 2000. Sejarah mencatat, kelahiran Provinsi Banten tidak lepas dari peranan kelompok jawara. Peranan para jawara sangat besar dalam mengawal dan menyukseskan perjuangan ini bersama dengan tokoh masyarakat, ulama, dan rakyat Banten. Pasca Banten menjadi provinsi, maka peluang para jawara untuk memasuki ranah pemerintahan daerah menjadi semakin terbuka. Melalui legitimasi dan kepercayaan masyarakat Banten atas perannya dalam menggolkan Banten menjadi provinsi serta didukung oleh kemampuannya dalam berinteraksi secara politik, maka kelompok jawara dapat dengan mudah memasuki ranah politik pemerintahan (Amalia Syauket, 2021: 11-12).

Ketika naiknya Ratu Atut Chosiyah sebagai wakil gubernur Banten tahun 2007 lalu, tidak lepas dari peran *informal governance* (pemerintahan informal) yang dilakukan oleh Haji Chasan Sohib. Pada awal berdirinya provinsi, ia menempatkan putrinya, Ratu Atut Chosiyah sebagai Wakil Gubernur, berpasangan dengan politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan, Djoko Munandar sebagai Gubernur. Haji Chasan Sohib, Sang Jawara Banten ini pernah berujar “Sayalah Gubernur Jenderal”. Kalimat itu dilontarkan sang Jawara setelah Chasan mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001, dijelaskan oleh Amalia Syauket (Amalia Syauket, 2021: 20).

Dinasti politik yang terjadi di Banten bagi Amalia Syauket dianggapnya bertipe *octopussy* karena adanya sinergi antara pengusaha dengan penguasa dalam membentuk dinasti. *Octopussy* ini dijadikannya sebagai judul bukunya, terinspirasi dari film James Bond tahun 1983 yang kemudian dianalogikan dengan gurita korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Kepala gurita dianalogikan sebagai *local strongman* dan delapan lengan merupakan jejaring yang menjerat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Aset, Sumber Daya Alam (SDA), dan kehidupan masyarakat Banten demi

mempertahankan kekayaan dan harta keluarga dan para kerabat Klan Ratu di Banten (Amalia Syauket, 2021: viii).

Para Kepala Daerah dalam membangun dinasti politik, menurut Amalia Syauket dilakukan dengan menancapkan tiga pilar utama selama menjabat. *Pertama*, pilar birokrasi dengan menempatkan orang-orangnya di jajaran pejabat bawahannya untuk memudahkan mengatur, mengarahkan dan mengendalikan berdasarkan kepentingan, orientasi dan rasional subyektif. *Kedua*, pilar bisnis dengan mendistribusikan berbagai proyek (yang berada di seluruh instansi di daerahnya) kepada pengusaha kliennya, keluarganya atau kroni-kroninya melalui tender formalitas termasuk di dalamnya pemberian *good will* untuk urusan bisnis atau investasi yang langsung “diuangkan”. *Ketiga*, dengan mendorong dan mendukung barisan keluarganya (anak atau istri/suaminya atau mertuanya, kakak/adik, ipar atau sepupunya) ke berbagai peluang jabatan politik baik di daerah dan di pusat (Amalia Syauket, 2021: 3).

Peneliti LIPI Wasisto Raharjo Jati mengungkapkan, kasus dinasti politik Banten merupakan *by design* oleh para kerabatnya untuk terjun ke dunia politik. Dinasti politik Banten telah berdiri kokoh seiring dengan usia Provinsi Banten sehingga jaringan kekuasaan telah tersebar kuat di pemerintahan (Wasisto Raharjo Jati, 2013: 220). Sekarang, dinasti politik yang terjadi di Banten telah berhasil menempatkan kerabat, anggota keluarga, dan kroninya di banyak posisi. Dalam pemerintahan daerah, beberapa anggota keluarga Atut masih menduduki jabatan penting seperti kepala daerah di kota dan kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi, Kota, Kabupaten, maupun dunia usaha dan posisi publik lainnya (Amalia Syauket, 2021: 27).

Para anggota keluarga dari Dinasti Politik Atut, awalnya tidak secara langsung berada di pusat kekuasaan, akan tetapi menikmati *political protection* dari oligark-sang kakak/istri yang sedang berkuasa, terutama demi keberlangsungan dan kesinambungan sebuah dinasti politik. Anak-anak dan keturunan Haji Chasan Sohib

kemudian mengikuti jejaknya dalam memasuki kancah politik dan memilih Golkar sebagai kendaraan politik. Walaupun mereka tidak langsung berkuasa, tetapi karena kedekatan sering kali lebih berkuasa dari penguasa formal sendiri (Amalia Syauket, 2021: 30).

Dari beberapa nama tersebut, pada awalnya mengawali karir melalui jaringan informal yang kemudian masuk pada jajaran pemerintahan secara formal, antara lain: Andika Hazrumy menjadi Wakil Gubernur Banten, Ratu Tatu Chasanah menjabat Bupati Serang dua periode 2016 dan 2020, Ratu Ria Maryana juga merupakan adik tiri Ratu Atut, kini dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Selain itu, Ria pun menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar Kota Serang. Kemudian Airin Rachmi Diany, Airin berhasil menjabat Wali Kota Tangerang Selatan dua periode 2011 dan 2016 (Amalia Syauket, 2021: 30).

Tabel 1. Dinasti Politik Ratu Atut Chosiyah

Nama	Jabatan
Andika Hazrumy (Anak Pertama)	Wakil Gubernur Banten 2017-2022
Andiara Aprilia Hikmat	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan (dapil) Banten 2019-2024
Ade Rossi Chaerunnisa (Istri Andika Harzrumy)	Anggota DPR Periode 2019-2024
Tanto Warsono (Suami Andiara Aprilia Hikmat)	Wakil Bupati Pandeglang terpilih Pilkada 2020, periode 2020-2024
Tubagus Khaerul Zaman (adik tiri Atut)	Anggota DPR Periode 2019-2024
Ratu Ria Maryana (adik tiri Atut)	Wakil Ketua DPRD Kota Serang Periode 2019-2024
Ratu Tatu Chasanah (adik Atut)	Bupati Serang terpilih Pilkada 2020, periode 2021-2024
Pilar Saga Ichsan (keponakan Ratu Atut, anak Ratu Tatu Chasanah)	Wakil Wali Kota Tangerang Selatan terpilih Pilkada 2020, periode 2021-2024
Airin Rachmi Diany (Adik Ipar Atut)	Walikota Tangerang Selatan dua periode (2011-2016, dan 2016-2021)
Aden Abdul Khalig (Adik Ipar Atut)	Anggota DPRD Banten periode 2009-2014
Ratna Komalasari (ibu tiri)	Anggota DPRD Kota Serang 2009-2014

Heryani (Ibu Tiri Atut)

Wakil Bupati Pandeglang periode 2011-2016

Hikmat Tomet (Suami)

Anggota DPR 2009-2014

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Fenomena masuknya para anggota keluarga ke pemerintahan dikarenakan adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Keluarga merupakan satu kelompok biologikal dan juga kelompok sosial yang secara relatif mempunyai anggota tetap. Sebab itu dihubungkan dengan aspek keturunan (darah), perkawinan ataupun keluarga angkat karena budaya. Oleh karena kedekatan inilah maka anggota keluarga diberi tanggung jawab utama, antara lain: *pertama*, tanggung jawab ekonomi; *kedua*, mencapai status ekonomi, sosial dan politik yang dicita-citakan; dan *ketiga*, mewujudkan rasa keeratan satu sama lainnya. Di luar itu semua, para oligark menganggap “kesetiaan” sebagai satu sifat yang hanya dimiliki oleh keluarga, saudara atau kerabat dekat. Itulah yang menjadi argumen utama yang diterima untuk mempertahankan ataupun menjustifikasikan atas pelantikan-pelantikan yang berunsur personal. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang setia, bisa dipercaya dan mampu “bekerjasama”. Setelah jaringan keluarga terbentuk, maka mereka akan berusaha untuk menjaga solidaritas antar sesama anggota keluarga dari keluarga atau kelompok lain untuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang menguntungkan (Amalia Syauket: 2020: 30-31).

Politik kekeluargaan tersebut tidak jarang dikaitkan dengan praktik nepotisme, memberikan mereka keutamaan dan keistimewaan supaya dapat meningkatkan prestise keluarga, serta menambah pendapatan keluarga dalam rangka membentuk satu mesin politik bagi terbentuknya dinasti politik (dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak), sehingga mampu berdiaspora dan menggurita dan pada akhirnya mampu menentukan orientasi atau kepentingan ekonomi-politik keluarga dengan mengatasnamakan lembaga dan jabatan-jabatan formal di pemerintahan (Amalia Syauket, 2021: 31).

Keluarga menjadi cikal-bakal pembentukan dinasti di Banten, yang berarti telah menimbulkan kesenjangan yang terpaut begitu lebar antara mereka yang memiliki akses karena kedekatan dengan sebagian orang yang tidak mempunyai akses atau kedekatan dengan keluarga Ratu Atut. Gejala patronase muncul dalam rekrutmen pegawai yang bersifat tertutup, eksklusif, tanpa kompetensi dan terbatas pada para pemegang sumber daya. Dalam kultur nepotisme hal ini memperoleh ruang yang ideal, dimana faktor kekerabatan keluarga mendapat tempat terbuka dalam konteks promosi. Fenomena birokrasi tersebut terkesan sebagai warisan kekuasaan dari nenek moyangnya yang dilimpahkan secara patronase dan nepotisme (Amalia Syauket, 2021: 31).

Dampak dari Dinasti Politik terhadap provinsi Banten diuraikan juga dengan cermat oleh Amalia Syauket, bahwa menyebabkan Provinsi Banten tercatat sebagai salah satu provinsi terkorup. Di antaranya adalah faktor monopoli kekuasaan di bidang pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh lingkup pemerintahan di Provinsi Banten baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota di Banten, bidang pemerintahannya dimonopoli oleh keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Selanjutnya, pada tahun 2012/2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebesar 648.300 jiwa berada pada peringkat ke-12 tertinggi dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Angka putus sekolah di Banten masih tinggi dan juga angka pengangguran di daerah itu yang juga masih relatif tinggi (Amalia Syauket, 2021: 50).

Dalam kasus Wawan pasca terjerat kasus korupsi, sang Pangeran Banten menjadi bukti sinergi antara oligark-Penguasa-Ratu Atut Chosiyah (kakak) sebagai Gubernur Banten dengan Pengusaha swasta-Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik) di ranah ekonomi-politik, yang berakar kuat pada adanya kelindan praktik korupsi sehingga menyandera negara (*state-captured corruption*) dengan cara melemahkan fungsi otoritas kelembagaan pemerintahan daerah Banten (Amalia Syauket, 2021: 54).

Sekarang ini, harus diakui tetap menguatnya Dinasti Politik Banten ditenggarai karena hadirnya kesempatan politik kekerabatan yang tidak bisa dilepaskan dari sikap partai politik yang tidak lagi mementingkan regenerasi kepemimpinan. Malah, partai politik telah membiarkan terjadinya dinasti-dinasti politik di daerah-daerah, dampak dari ini tentu saja ranah perpolitikan menjadi tidak kondusif oleh adanya segelintir elite dari beberapa keluarga, klan, atau dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu.

Sehingga, mereka berusaha menutup wilayah kekuasaannya dari pengaruh luar, mengakibatkan daerah pemilihan dianggap sebagai milik keluarga, dampaknya adalah sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan maupun proses demokrasi yang sehat dan substansial, bahkan juga harapan terhadap kesejahteraan masyarakat juga semakin meredup. Patut dipahami bahwa dengan penunjukkan calon-calon untuk pemilihan berdasarkan keturunan semata di suatu wilayah tertentu, maka kita menemukan juga suatu gejala oligarki yang gawat yaitu nepotisme; inilah yang sedang terjadi dari berlangsungnya politik kekerabatan di daerah-daerah, dampak luasnya adalah ingin mewujudkan politik kewarisan berdasarkan dinasti politik tersebut (Robert Michels, 1984: 118-119).

Daftar Pustaka

- Ansar (Ed). Ingat Airin Rachmi? Dulu Disebut Potensial Gantikan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI, Minta Didoakan, *Tribunnews.com*, from <https://makassar.tribunnews.com/2022/06/08/ingat-airin-rachmi-dulu-disebut-potensial-gantikan-anies-baswedan-jadi-gubernur-dki-minta-didoakan?page=all>
- Daulay, Lukmanul Hakim. (2014). Jenguk Suami di Penjara: Setelah Menangis, Airin Kini Tersenyum, *Kabar24.bisnis.com*, from <https://kabar24.bisnis.com/read/20140206/15/201430/jenguk-suami-di-penjara-setelah-menangis-airin-kini-tersenyum>
- Fahjri Sukri, Mhd. Al. (2020). Dinasti Politik di Banten: Familisme, Strategi Politik dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

(JISPO), Vol. 10, No. 2, 2020, from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/8316/5097>

Jati, Wasisto Raharjo. (2013). Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, Juli 2013, from http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_121984577643.pdf

Michels, Robert. (1984). *Partai Politik Kecenderungan Oligarkis Dalam Birokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers.

Romli, Lili. (2007). *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)*. Disertasi Doktorat, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Syauket, Amalia. (2021). *Octopussy: Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten*, Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka.